

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu upaya dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, yakni pada sektor pariwisata. Pariwisata di atur pada Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2009 membahas tentang Kepariwisataan. Pariwisata salah satu upaya untuk membuka lapangan pekerjaan, mendorong perekonomian daerah sekaligus melestarikan alam. Hal ini diatur di UU tersebut bahwa setiap masyarakat sekitar berhak menjadi bagian pekerja pariwisata, berjualan di pariwisata, maupun sebagai pengelola pariwisata. Masyarakat memiliki peran penting bagi pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata juga mengedepankan kondisi alam dan menjunjung tinggi nilai kearifan lokal dengan memberdayakan sumber daya manusia untuk menjaga alam yang menjadi lahan pariwisata.

Pada UU RI Nomor 10 Tahun 2009 membutuhkan pelaksanaan yang ditetapkan dengan menetapkan peraturan baru yaitu PP RI Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. Pada Peraturan tersebut melaksanakan perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional dengan membuat aturan yang mengatur pada Daya Tarik Wisata salah satu jenis atau kategori kegiatan wisata, yakni wisata alam (*nature-based tourism*). Tujuan dari pembangunan pariwisata, yakni: a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, c. Menghapus kemiskinan, d. Mengatasi pengangguran, e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, f. Memajukan kebudayaan, g. Mengangkat citra bangsa, h. Memupuk rasa cinta tanah air, i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan

bangsa, dan j, Mempererat persahabatan antar bangsa. Pada tujuan pembangunan pariwisata tersebut dapat melalui pengembangan ekonomi lokal.

Pengembangan ekonomi lokal dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan sumber daya masyarakat. Pada sektor pariwisata memiliki kegiatan-kegiatan yang sedikit, sehingga dalam hal ini juga akan menimbulkan efek eksternalitas negatif yang sedikit juga. Hal ini diharapkan dalam seluruh kegiatan yang ada menghasilkan keuntungan baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat dengan konsep *sustainable development*. Salah satu konsep pembangunan pariwisata dengan pengembangan ekonomi lokal adalah wisata alam. Wisata alam memiliki sumberdaya alam dan lingkungan yang memberikan pengenalan pengetahuan tentang alam dan pengalaman rekreasi.

Berkembangnya pariwisata dapat memberikan kontribusi pendapatan dengan melibatkan masyarakat. Masyarakat dilibatkan secara langsung sebagai pengelola pariwisata. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata harus dibekali dengan pelatihan, karena pada dasarnya pengelola pariwisata sering kali terjadi kekeliruan atau permasalahan. Permasalahan yang ada di pariwisata pernah dilakukan oleh peneliti Nugroho (2020), bahwa pada permasalahan di pariwisata sering kali terjadi seperti aturan yang masih tumpang tindih, kurangnya kualitas SDM atau SDM yang masih belum memiliki keahlian, kurangnya publikasi, infrastruktur belum memadai, kurangnya perhatian akan lingkungan.

Permasalahan di atas diperkuat oleh pendapat Eddyono (2021) yang menyebutkan bahwa meskipun pariwisata dapat membuka lapangan pekerjaan, namun terdapat kesenjangan. Terjadinya ketidaksetaraan pendapatan yang dihasilkan tiap antar kelompok masyarakat, disebabkan hanya menguntungkan orang-orang tertentu. Kesenjangan ekonomi ini dialami antara masyarakat

golongan atas dengan golongan bawah. Kesenjangan ekonomi tersebut dilakukan dengan cara memperoleh keuntungan dengan semaksimal mungkin dengan tidak memperdulikan orang lain. Hal ini yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi masyarakat semakin tajam. Dinamika konflik sosial antar ruang kekuasaan akan berlangsung semakin kompleks, dengan adanya pembentukan sebuah ruang kekuasaan yang tidak merepresentasikan struktur sosial. Kelembagaan dapat memberikan perannya dalam memecahkan permasalahan tersebut dengan adanya tata kelola yang teratur dan terarah. Kelembagaan diharapkan akan menghasilkan struktur sosial yang merata di kalangan masyarakat. Hal ini juga diatur pada UU RI Nomor 10 Tahun 2019 yang mana membutuhkan kelembagaan dalam jejaringan yang dikembangkan secara terorganisasi sehingga membutuhkan aktor. Aktor-aktor tersebut seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Aktor swasta disini merupakan pihak yang memberikan dukungan baik secara kontribusi modal, barang maupun jasa.

Publikasi yang kurang dalam memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai wisata alam dapat memberikan kerugian pada sektor pariwisata. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang ada di pariwisata mengenai kurangnya memiliki jejaring sosial. Jejaring sosial dapat memberikan informasi secara luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi secara langsung yaitu pihak pariwisata memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat umum. Informasi secara tidak langsung yaitu pihak pariwisata memberikan informasi ke individu, kemudian individu tersebut memberikan informasi kepada individu lainnya. Hal ini merupakan manfaat dari kelembagaan melalui jejaring sosial yang memberikan kemudahan dalam hal publikasi.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Rahmawati & Novaria pada tahun 2019, yang menunjukkan bahwa dalam pengelolaan wisata juga terdapat permasalahan. Permasalahan tersebut seperti pola pikir masyarakatnya yang kurang dalam memahami kepariwisataan, sumber permodalan yang terbatas, dan pengelola pokdarwis itu sendiri yang masih belum bisa konsisten dalam mengembangkan objek wisata Waduk Grobogan. Hal ini membuat permasalahan baru pada jalannya infrastruktur dan lingkungan yang dikelola. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi dengan tata kelola. Tata kelola terdapat modal sosial yang membutuhkan peran beberapa *stakeholder* yang berkaitan seperti pemerintah, masyarakat itu sendiri, dan swasta. Modal sosial memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan sosial ekonomi. Menurut Harphan (2014), modal sosial lebih menekankan pada hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok dengan memperhatikan jejaring sosial, norma, nilai, dan kepercayaan adat istiadat. Modal sosial memiliki hubungan dengan masyarakat. Masyarakat sangat diperlukan untuk menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi (Muntasib, 2017).

Modal sosial menjadi sebuah tantangan sendiri untuk menumbuhkan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah (*stakeholder*). Dalam konteks umum, menurut Flora modal sosial memiliki 3 elemen, yaitu kepercayaan, hubungan timbal balik, dan kerja sama (Muntasib, 2017). Kepercayaan (*Trust*) dalam pembentukan modal sosial merupakan inti pembangunan. Apabila kurangnya kepercayaan terhadap masalah sosial akan memicu konflik. Pembangunan ekonomi harus diiringi dengan perubahan sosial, dengan ini masalah sosial dapat dihindari dan pembangunan ekonomi dapat berjalan lancar. Hal ini dibutuhkan kelembagaan untuk pemecahan masalah sosial yang kompleks

di sebuah kelompok atau organisasi. Ketidaktepatan informasi yang menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan antar ketua dan anggota. Pemecahan permasalahan sosial dapat terselesaikan dengan kelembagaan. Kelembagaan tidak hanya mengenai penerapan kebijakan atau aturan, namun juga membahas mengenai modal sosial yang membutuhkan kepercayaan untuk menciptakan interaksi jejaring yang kuat.

Modal sosial juga mencakup partisipasi dalam suatu jaringan, yakni a. Ikatan kerja sama dengan pemerintah daerah (kota, kabupaten, dan provinsi), b. Ikatan kerja sama dengan pengelola wisata, c. Ikatan kelembagaan, d. Jaringan kerjasama antar sesama, e. Keterbukaan dalam jejaring sosial dengan siapapun, f. Motivasi untuk melakukan jejaring sosial, g. Keaktifan dalam menyelesaikan konflik, dan h. Keaktifan dalam memelihara dan mengembangkan jejaring sosial (Muntasib, 2017). Jejaring kemitraan memiliki dua sifat mengikat secara formal dan nonformal. Jejaring kemitraan formal secara umum maupun kelembagaan. Hal ini terlihat dari setiap jejaring sosial yang terbentuk memiliki wadah kelembagaan berupa kelompok/organisasi/forum. Sedangkan kemitraan secara nonformal dilakukan secara sukarela, keterbukaan dan sadar dari diri sendiri dalam membangun jaringan.

Pemanfaatan alam mulai memasuki wilayah di Kabupaten Bangkalan dengan menjadikan alamnya sebagai tempat berwisata. Di Bangkalan sendiri memiliki banyak pesona alam yang berpotensi menjadi objek pariwisata menarik dengan budaya yang dimiliki. Hal ini menjadi peluang bagi masyarakat Bangkalan untuk mencari dan meningkatkan pendapatannya. Masyarakat juga dapat bergabung sebagai pengelola wisata alam (pokdarwis). Bergabungnya

masyarakat menjadi pokdarwis diharapkan tidak hanya mempengaruhi perekonomian, namun juga merawat lingkungan alam.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada studi pendahuluan menemukan kasus mengenai tata kelola berdasarkan temuan jejaring. Kasus yang ditemukan bahwa terdapat persoalan pengelolaan wisata yang ada di Desa Labuhan, dimana di Desa Labuhan memiliki dua wisata, yakni Wisata Mangrove Labuhan dan Wisata Alam Mangrove Jung Koneng. Dua wisata tersebut memiliki kesamaan yaitu mengangkat mengenai wisata alam dan jejaring kerjasamanya juga sama yakni dengan kemitraan Pertamina. Dalam pengelolaannya dua wisata tersebut memiliki perbedaan, dimana Wisata Alam Mangrove Jung Koneng lebih baik dibandingkan dengan Wisata Mangrove Labuhan. Padahal Wisata Alam Mangrove Jung Koneng ini terbilang baru, dibandingkan dengan Wisata Mangrove Labuhan. Wisata alam Mangrove di desa Labuhan yang pertama didirikan pada tahun 2014, sedangkan Wisata Alam Mangrove Jung Koneng didirikan pada tahun 2019.

Di Wisata Alam Mangrove Jung Koneng tidak hanya memanfaatkan wisata sebagai tempat beraktivitasnya nilai ekonomi, namun juga memanfaatkan lingkungan alam wisata yang ada disana. Pemanfaatan lingkungan alam di wisata sangat jarang dilakukan di wisata lainnya. Observasi awal yang dilakukan peneliti dengan adanya pemanfaatan lingkungan alam di Wisata Alam Mangrove Jung Koneng menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian di tempat ini. Hal ini menjadikan peneliti berkeinginan untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam lagi mengenai tata kelola di Wisata Alam Mangrove Jung Koneng Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan diatas dapat ditemukan rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tata kelola pada Wisata Alam Mangrove Jung Koneng, di Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Permasalahan diatas dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tata kelola pada Wisata Alam Mangrove Jung Koneng di Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu mengambil berbagai manfaat diantaranya:

1. Manfaat teoritik: penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan keilmuan ekonomi mengenai ekonomi kelembagaan secara makro dan mikro.
2. Manfaat praktis: penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk pengembangan sektor pariwisata, khususnya bagi pokdarwis terkait dengan pengelolaan pariwisata.